



Historiografi Perkembangan Islam Nusantara di Cirebon: dalam Perspektif Keraton

Muhamad Sidik

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: Muhamadsidik743@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-02-05 Revised: 2026-03-10 Published: 2026-04-04	<p>Cirebon has long been recognized as a center of Islamic religious and cultural activity in the Indonesian archipelago. As one of the earliest centers of Islamic civilization and culture on the island of Java, and for approximately a century since its arrival in the late 14th century, Islam continued to expand its influence among the population. Local customs and kinship traditions also played a role in the form of Islam that developed in Cirebon, distinguishing it from the development of Islam elsewhere in the Indonesian archipelago. To date, research on the history of Islam in Cirebon has not addressed certain aspects, thus necessitating a more in-depth historiographical study, particularly one that takes into account the perspective of the Cirebon Palace itself. This study aims to provide an explanation and analysis of the historiography of the development of Islam in the Indonesian archipelago in Cirebon from the palace's perspective. This research is a qualitative research using historical research methods consisting of four stages, namely heuristics (collection of sources), criticism (verification), interpretation (interpretation), historiography (writing of history). The results of the research are expected to provide an understanding related to the entry of Islam into Cirebon and its development which is part of Islam Nusantara through historical records of the palace as a form of Islamic historiography in Cirebon from the beginning of the Islamization process to its development in forming local and national identities in the region so that a deeper understanding of the historical roots is obtained and becomes a strong foundation for understanding identity and cultural sustainability.</p>
Keywords: <i>Cirebon;</i> <i>Historiography;</i> <i>Islamic Archipelago;</i> <i>Palace.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-02-05 Direvisi: 2026-03-10 Dipublikasi: 2026-04-04	<p>Cirebon telah lama diakui sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan dan budaya Islam di Nusantara. Sebagai salah satu pusat peradaban dan kebudayaan Islam paling awal di Pulau Jawa dan selama kurang lebih satu abad sejak kehadirannya pada akhir abad ke-14, Islam terus melakukan perluasan pengaruhnya di kalangan penduduk. Adat istiadat lokal dan tradisi kekerabatan juga berperan dalam bentuk Islam yang berkembang di Cirebon yang membedakannya dari perkembangan Islam di tempat lain di Nusantara. Selama ini, penelitian mengenai sejarah Islam di Cirebon belum menyentuh pada beberapa aspek tertentu sehingga terdapat kebutuhan akan kajian historiografi yang lebih mendalam, terutama yang memperhitungkan perspektif dari Keraton Cirebon itu sendiri. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan dan analisis mengenai historiografi perkembangan Islam Nusantara di Cirebon dalam perspektif keraton. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi), interpretasi (penafsiran), historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan masuknya Islam ke Cirebon dan perkembangannya yang merupakan bagian dari Islam Nusantara melalui catatan-catatan sejarah keraton sebagai bentuk dari historiografi Islam di Cirebon dari awal proses islamisasi hingga perkembangannya dalam membentuk identitas lokal dan nasional di wilayah tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang akar historis dan menjadi landasan yang kuat untuk pemahaman identitas dan keberlanjutan budaya.</p>
Kata kunci: <i>Cirebon;</i> <i>Historiografi;</i> <i>Islam Nusantara;</i> <i>Keraton.</i>	

I. PENDAHULUAN

Studi historis menunjukkan bahwa Islam di Cirebon berkembang dalam konteks budaya dan kekuasaan yang unik. Adat istiadat lokal dan tradisi kekerabatan juga berperan dalam bentuk Islam yang berkembang di Cirebon yang

membedakannya dari perkembangan Islam di tempat lain di Nusantara. Wilayah ini menjadi simpul tengah yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Dengan rentang sejarahnya, menjadi kota yang menarik perhatian untuk dikaji. Hal itu disertai asumsi proses mata

rantai sejarah panjang dari sisi historis, politik, ekonomi, sosial, kultural yang menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam Indonesia (Firmanto, 2015: 32). Sejarah panjang tersebut tidak lepas dari bercokolnya Kesultanan Cirebon sebagai pusat kekuasaan Islam di wilayah ini dan sekitarnya. Bukti adanya pusat kekuasaan tersebut berupa keraton yang saat ini masih ada dan terjaga kelestariannya. Setidaknya terdapat empat keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Keprabonan (Aminudin, 2023:31).

Selama ini penelitian mengenai sejarah Islam di Cirebon belum menyentuh pada beberapa aspek tertentu sehingga terdapat kebutuhan akan kajian historiografi yang lebih mendalam terutama yang memperhitungkan perspektif dari Keraton Cirebon itu sendiri. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pandangan internal tentang sejarah Islam di wilayah tersebut dibentuk dan dipelihara. *Pertama*, kajian mengenai keraton sebagai bukti eksistensi Kesultanan Cirebon. Pada kajian ini lebih menekankan mengenai berdirinya sebuah kekuasaan Islam di Cirebon dan menjadikan keraton sebagai episentrumnya. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) dalam *Peran Sunan Gunung Jati dalam Mendirikan Keraton di Cirebon dan Banten*. *Kedua*, kajian mengenai keraton sebagai wisata sejarah dan budaya di Cirebon. Kajian tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian WY. Astari (2023) dalam *Hubungan Timbal Balik antar Aktor dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kota Cirebon*. *Ketiga*, kajian keraton yang menekankan pada arsitektur bangunan. Ini terlihat dari hasil penelitian H. Sulaiman dan S. Firmansari (2020) dalam *Analisis Geometri Fraktal pada Bentuk Bangunan Komplek Keraton Kanoman Cirebon*.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut tidak banyak yang mengulas tentang bagaimana perspektif keraton mengenai perkembangan Islam Nusantara di Cirebon dari catatan sejarah atau historiografi. Keraton dalam kajiannya memberikan kesan sebagai objek atau benda indrawi dari suatuinggalan sejarah. Padahal sebetulnya, keraton dapat dilihat dari sudut pandang yang lain. Keraton dapat memberikan perspektif dalam mengungkap perkembangan Islam di wilayah tempat keraton berada melalui catatan-catatan sejarah atau karya historiografi yang ditinggalkannya. Didasarkan pada kondisi tersebut, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan dan

analisis mengenai historiografi perkembangan Islam Nusantara di Cirebon dalam perspektif keraton. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan pemahaman terkait dengan masuknya Islam ke Cirebon dan perkembangannya yang merupakan bagian dari Islam Nusantara melalui catatan-catatan sejarah keraton sebagai bentuk dari historiografi Islam di Cirebon.

Penelitian ini akan membantu mengungkap bagaimana sejarah Islam di Cirebon dari awal proses islamisasi hingga perkembangannya dalam membentuk identitas lokal dan nasional di wilayah tersebut. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, pemahaman yang lebih mendalam tentang akar historis suatu komunitas dapat menjadi landasan yang kuat untuk pemahaman identitas dan keberlanjutan budaya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penelitian tentang historiografi perkembangan Islam Nusantara di Cirebon dari perspektif Keraton diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga antara agama, kekuasaan dan budaya dalam konteks lokal Nusantara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Sulasman (2014:75), metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (penafsiran), historiografi (penulisan sejarah).

Di antara langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Pada tahap *heuristik*, yaitu melakukan penelusuran sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini, baik berupa sumber tertulis, sumber lisan, maupun sumber benda (Kuntowijoyo, 2005:96-99). Adapun teknik yang digunakan pada tahapan ini meliputi studi pustaka, studi lapangan/observasi, dan wawancara.
2. Setelah sumber/data didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik atau verifikasi terhadap sumber tersebut, baik kritik eksternal untuk menentukan otentisitas/keaslian sumber, maupun kritik internal untuk menentukan kredibilitas sumber (Kuntowijoyo, 2005:100-101). Pada tahap ini pula, sumber/data yang didapatkan kemudian diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder.
3. Setelah data/sumber diverifikasi, maka didapatlah rangkaian fakta untuk kemudian

ditafsirkan pada tahapan interpretasi/penafsiran. Rangkaian fakta tersebut dilakukan analisis/menguraikan dan juga sintesis/menyatukan sehingga diperoleh keterangan yang utuh dan padu (Kuntowijoyo, 2005:102-104).

4. Tahapan selanjutnya adalah menyajikan rangkaian fakta yang sudah ditafsirkan menjadi keterangan utuh dan padu tersebut secara kronologis/diakronis serta sinkronis dalam bentuk tulisan sejarah atau historiografi yang merupakan tahap akhir dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Islamisasi di Cirebon

Agama Islam masuk ke Cirebon pada permulaan abad ke-14 M. kondisi itu bersamaan terjadinya kontak pertama antara orang-orang asing, dalam hal ini orang Arab dan Tiongkok dengan pribumi. Islam pun dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai agama pendatang yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Tiongkok. Namun, karena saat itu belum terjadi kontak budaya yang signifikan, penyebaran Islam pun terjadi secara masif pada masa Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon (Zulfah, 2014).

Ketika pertama datang orang-orang Arab dan Tionghoa menempati wilayah pesisir Cirebon. Sebagai pedagang, mereka lebih banyak melakukan aktivitasnya di sana. Maka tidak heran jika hanya wilayah pesisir saja yang sejak awal telah mengenal Islam. Pada 1415 berdiri kampung Tionghoa (*Pecinan*) di wilayah Pelabuhan Muara Jati. Pemukiman itu dibangun oleh utusan Laksamana Cheng Ho, penjelajah Tionghoa Muslim dari dinasti Ming. Salah seorang utusan itu adalah Tan Eng Hoat. Para pedagang asing itu banyak berinteraksi dengan penduduk lokal. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menetap di Cirebon. Mereka kemudian menikahi perempuan pribumi. Orang-orang Tionghoa menempati Pecinan, sementara orang-orang Arab menempati kampung Arab.

Para orang Tionghoa dan Arab di Kesultanan Cirebon cukup besar, keberadaan mereka berdampak pada perkembangan kebudayaan di masyarakat. Seperti terlihat pada bangunan, kesenian, hingga benda-benda. Mengenai cikal bakal penyebaran agama Islam di Cirebon. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peranan pedagang Muslim, Ulama, dan tokoh pribumi, mereka berjuang

dalam mewujudkan sebuah negara bercorak Islam dan bebas dari kekuasaan pemerintah kerajaan Sunda-Galuh. Setelah nagari Cirebon terbentuk, kota ini disinggahi pedagang asing melalui jalur perlintasan perdagangan yang bertaraf Internasional. Keberhasilan penyebaran Islam di Cirebon tidak lepas juga dari kiprah Walangsungsang, pendiri Istana Pakungwati kemudian berkembang menjadi Kerajaan Cirebon yang merupakan simbol kejayaan Islam pada abad ke 15 dan 16. Peran ulama sebagai penyebar Islam menjadi titik awal islamisasi di Cirebon (Zulfah, 2014). Dengan demikian, merujuk kepada teori islamisasi, awal penyebaran Islam lebih cenderung kepada teori Arab dan Teori Tiongkok.

Dalam proses penyebarannya, Islam ke Cirebon melalui beberapa saluran, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, Pendidikan, politik, budaya, dan tasawuf. *Pertama*, melalui saluran perdagangan misalnya, Cirebon yang merupakan salah satu Pelabuhan, menjadi wilayah ini terjadi kontak dengan pedagang muslim yang berkontribusi dalam penyebaran Islam. *Kedua*, melalui pernikahan juga menjadi saluran islamisasi dengan terjadinya pernikahan para saudagar muslim dengan perempuan pribumi yang membentuk keluarga dan komunitas muslim di Cirebon. *Ketiga*, banyaknya pesantren di Cirebon menandakan saluran Pendidikan juga berkontribusi dalam proses islamisasi. *Keempat*, berdirinya Cirebon sebagai sebuah kerajaan Islam menegaskan saluran politik membantu proses Islamisasi di wilayah ini. *Kelima*, banyaknya bentuk kebudayaan Islam di Cirebon menandakan proses islamisasi melalui pendekatan budaya juga terjadi di wilayah ini. *Keenam*, keberadaan tarekat dalam praktik keagamaan di Cirebon memantapkan anggapan bahwa saluran tasawuf menjadi media islamisasi yang efektif.

2. Perkembangan Islam Nusantara di Cirebon

Berdasarkan beberapa sumber, masuknya Islam ke Cirebon sekitar abad ke-14 M. Hal ini tidak lepas dari beberapa catatan dan peninggalan sejarah yang menegaskan anggapan tersebut. Dalam proses penyebarannya, perkembangan Islam di Cirebon tidak bisa lepas dari beberapa tokoh sentral yang mendakwahkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Di antara tokohnya, yaitu sosok Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi, Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang,

dan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah (Mahrus, 2011).

Syekh Nurjati atau yang juga dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi misalnya, dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit, yang berjarak sekitar 5 km sebelah utara Kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Di tempat tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai' mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam.

Sementara itu, sosok lain penyebar Islam di Cirebon, yaitu Walangsungsang yang lebih populer dengan nama Cakrabuwana. Secara historis, sosok tersebut sebagai titik tolak untuk mengetahui faktor genetik dalam Islamisasi di Cirebon. Walangsungsang atau Cakrabuwana itu bukan sekedar tokoh legenda, mitos, atau semacamnya, melainkan nyata bagian dari tokoh historis dan fakta sosial melalui rekonstruksi historis peradaban Islam Nusantara, terutama di Cirebon pada tahun 1445-1479 M.

Sedangkan Sunan Gunung Jati atau juga dikenal Syarif Hidayatullah dianggap sebagai era keemasan (*Golden Age*) perkembangan Islam di Cirebon. Pada masa kepemimpinannya, Cirebon merupakan masa perkembangan yang sekaligus juga kejayaan Islam di Cirebon yang menjadikan bidang politik, keagamaan, dan perdagangan, sangat maju pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya Cirebon sebagai sebuah kerajaan Islam. Bukti-bukti kejayaan Syarif Hidayatullah di Cirebon, selain persoalan keagamaan yang bersifat rohani dan penyebaran Islam tersebut, juga dapat dilihat pada bangunan fisik, seperti *Tajug* (Masjid), Kraton Pakungwati, saat ini berada di Kasepuhan, dan pelabuhan yang saat ini tidak seramai dahulu lagi.

Keberadaan Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, menjadikan Islam di Cirebon mengalami kejayaan dalam perkembangannya. Kesultanan Cirebon memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Kepemimpinan raja-raja yang beragama Islam, strategi dakwah yang damai dan akomodatif, serta posisinya sebagai pusat penyebaran Islam

menjadikan Cirebon sebagai salah satu kesultanan Islam yang paling berpengaruh di Nusantara.

Islam di Cirebon mengalami kemunduran pada masa Penjajahan Belanda. Terlebih di internal Kesultanan Cirebon sendiri mengalami perpecahan yang menjadikan kekuasaannya surut dari semula. Menurut Siddique dalam Mahrus (2011), Kesultanan Cirebon telah mengalami kemerosotan karena pihak lain (asing) sejak tahun 1681-1940. Beberapa perjanjian dengan VOC telah mendukung adanya kemunduran itu. Dampak internalnya, timbul perpecahan dalam Kesultanan Cirebon. Pemerintah Kolonial Belanda telah semakin dalam ikut campur mengatur Cirebon, karena itu semakin surutlah peranan dari kraton-kraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1906 dan 1926, kekuasaan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan pengesahan sebagai Kota Cirebon (*Gemeente Cheirebon*).

Sedangkan pada masa berikutnya, Perkembangan Islam di Cirebon setelah kemerdekaan menunjukkan dinamika yang menarik dan penuh dengan semangat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan zaman. Upaya untuk memadukan tradisi lama dengan modernitas menjadi kunci dalam menjaga kelestarian Islam di Cirebon dan menjadikannya kekuatan positif dalam pembangunan masyarakat. Wilayah ini menjadi simpul tengah yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Dengan rentang sejarahnya, menjadi kota yang menarik perhatian untuk dikaji. Hal itu disertai asumsi proses mata rantai sejarah panjang dari sisi historis, politik, ekonomi, sosial, kultural yang menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam Indonesia.

3. Historiografi Perkembangan Islam Nusantara di Cirebon dalam Perspektif Keraton

Berbicara tentang perkembangan Islam di Cirebon secara otomatis harus menyinggung lekatnya hubungan antara Islam di satu sisi dengan keraton di sisi lainnya. Hal itu tidak lepas dari fakta bahwa meski Islam pada awalnya tidak dikenalkan oleh para penguasa lokal, Islam di Cirebon pada masa selanjutnya identik dengan keraton. Sosok Pangeran Cakrabuwana dan Sunan Gunung Djati tidak saja merepresentasikan sebagai penguasa secara politik tetapi juga sebagai sosok penyebar Islam (*muballigh*). Bahkan, Sunan Gunung Jati

secara khusus tercatat sebagai salah satu dari Sembilan Wali (Walisongo) paling dihormati umat Islam di pulau Jawa. Di bawah kepemimpinannya yang menggabungkan antara misi dakwah dan politik, Islam menyebar di pulau Jawa bagian barat mulai Cirebon hingga Banten. Pada saat yang sama, ia juga berhasil mendirikan dua kerajaan Islam sekaligus di wilayah ini yaitu Cirebon (1485) dan Banten (1527) yang akan mendominasi percaturan politik di masa-masa berikutnya. Singkatnya, Islam telah menjadi sumber nilai sekaligus identitas bagi penduduk di kedua wilayah ini hingga kini (Rosidin, 2019).

Sebagaimana telah banyak dibahas oleh para sarjana ahli Cirebon bahwa kemunculan kerajaan di Cirebon tidak bisa lepas dari perkembangan gerakan Islamisasi di wilayah bagian barat dari pulau Jawa tersebut. Bahkan, kita bisa dengan berani menyimpulkan kemunculan Kerajaan Cirebon adalah produk dari Islamisasi itu sendiri. Pertama, pendiri kerajaan ini adalah para muballigh Islam awal terutama Pangeran Cakrabuana yang bernama asli Raden Walangsungsang dan bergelar Ki Shomadullah atau Haji Abdullah Iman pada tahun 1445 M. Kedua, pendirian kerajaan ini merupakan bagian upaya Pangeran Cakrabuana menjalankan *titah* gurunya, Syekh Nurjati, guna menyebarkan Islam ke wilayah lainnya di luar wilayah sekitar pelabuhan Muara Jati.

Dalam konteks politik, wilayah ini sebagaimana wilayah lainnya termasuk Cirebon Girang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Keberhasilan Pangeran Cakrabuana dalam mengembangkan Cirebon baik secara geografis maupun demografis tidak serta menjadikannya terpisah dari induk Kerajaan Pajajaran. Sejak sebelum wilayah ini berkembang pesat dan menjadi dua wilayah menjelang terjadinya proses Islamisasi, wilayah ini memang telah lama menjadi bagian dari wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Hampir seluruh wilayah yang berada di bagian barat pulau Jawa merupakan bagian dari wilayah Pajajaran, paling tidak sampai abad akhir abad ke 16. Sementara wilayah bagian Timur dan Tengah berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu Majapahit.

Alasan geopolitik di atas diperkuat oleh faktor hubungan geneologis antara penguasa Cirebon dengan penguasa Kerajaan Hindu Pajajaran. Pangeran Cakrabuana yang

bernama asli Raden Walangsungsang merupakan putra tertua Sri Baduga Maha Prabhu Siliwangi, maharaja Kerajaan Pajajaran dari istrinya yang bernama Nyi Mas Subang Larang. Walangsungsang merupakan kakak dari dua orang saudaranya, Nyi Mas Rara Santang dan Raden Kian Santang. Melihat hal tersebut, tentunya sulit membayangkan bahwa Pangeran Cakrabuana melakukan pemberontakan, meskipun sumber sejarah lokal juga mencatat bahwa alasan ia keluar dari Keraton Pajajaran karena perbedaan keyakinan agama. Selain itu, nampaknya Pangeran Cakrabuana lebih mengutamakan pengembangan Cirebon dibandingkan dengan upaya politik lainnya.

Singkatnya, Cirebon di bawah kepemimpinan Pangeran Cakrabuana telah menjelma sebagai salah satu sentra ekonomi penting dalam jaringan perdagangan internasional dan menjadi salah satu pusat utama penyebaran Islam di wilayah bagian utara Jawa Barat. Semua perkembangan yang terjadi di wilayah Cirebon tentunya mendapat perhatian dari Raja Pajajaran. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk tetap memastikan bahwa wilayah ini tetap berada di wilayah Pajajaran, Raja Pajajaran menganugerahkan gelar Tumenggung kepada Pangeran Cakrabuana. Penganugerahan ini secara simbolis melalui sebuah upacara yang berintikan pemberian *Petandha Kaprabon* dengan simbol pemberian Kursi Gading Gilang Kencana. Upacara ini dilakukan dan langsung dipimpin oleh Tumenggung Jayabaya, utusan khusus Sri Baduga Maharaja Prabhu Siliwangi. Dengan gelar tersebut, Pangeran Cakrabuana mendapatkan jabatan sekaligus nama baru, Tumenggung Sri Mangana (Rosidin, 2017).

Pemberian gelar Tumenggung ini secara otomatis pula mengangkat posisi dan kedudukan Pangeran Cakrabuana pada level elit dalam struktur pemerintahan Kerajaan Hindu Pajajaran. Penganugerahan gelar ketumenggungan sekaligus bisa dipandang sebagai bukti atas pengakuan kekuasaan Pangeran Cakrabuana atas wilayah bagian utara Jawa Barat ini. Ia merupakan perwakilan langsung Raja pada wilayah yang menjadi kekuasaannya. Jika dibandingkan dengan sekarang, nampaknya posisinya hampir mirip dengan gubernur sebuah provinsi. Perbedaannya adalah bahwa Tumenggung memiliki kewenangan otonom yang relatif luas dalam sistem pemerintahan

kerajaan saat itu yang masih fleksible. Kewajibannya hanyalah untuk memastikan bahwa setiap tahun ia harus menyerahkan upeti (*Bulu Bhekti*) sebagai wujud loyalitas sekaligus bagian dari Kerajaan.

Status sebagai bagian dari Kerajaan Hindu Pajajaran ternyata hanya pada masa kepemimpinan Ki Gedheng Alang-alang (Kuwu Pertama) dan Pangeran Cakrabuwana (Kuwu Kedua). Peta politik berubah seiring terjadinya pergantian kepemimpinan Cirebon dari Pangeran Cakrabuwana kepada keponakannya, Syarif Hidayatullah, putra kedua Nyi Mas Rara Santang sekaligus cucu Sri Baduga Maharaja Prabhu Siliwangi, pada akhir abad ke 15. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah, Cirebon justru menolak untuk membayar upeti dan memilih untuk memisahkan diri serta menjadi Kerajaan baru yang merdeka. Peristiwa inilah yang menjadi titik awal lahirnya Kerajaan Islam pertama di wilayah bagian barat Pulau Jawa sebelum nantinya tokoh yang sama mendirikan Kerajaan Islam Banten pada tahun 1527 (Rosidin, 2019).

Peristiwa pemisahan diri tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, namun melalui berbagai proses yang cukup panjang. Pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah yang lahir tahun 1448 di Mesir tiba di Cirebon setelah melakukan proses perjalanan panjang baik untuk belajar mencari ilmu agama maupun mencari pengalaman. Syarif Hidayatullah yang digambarkan sebagai sosok yang sempurna untuk menjadi pemimpin besar karena memiliki kepribadian yang rendah hati, tidak sombong, sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur kata, cerdas, memiliki ilmu baik agama maupun non-agama yang sempurna dan tangkas serta visioner dipandang sebagai sosok yang paling pantas untuk menggantikan posisi *uwa-nya*, Pangeran Cakrabuwana.

Seakan gayung bersambut, tidak lama dari kedatangan Syarif Hidayatullah ke tanah Cirebon pada tahun 1479, ada dua peristiwa penting yang bisa dikatakan sebagai tahapan strategis menuju puncak kepemimpinan di Cirebon. Pertama, Syarif Hidayatullah dinikahkan dengan Nyi Mas Pakungwati. Kakak sepupu sekaligus putri Pangeran Cakrabuwana. Pernikahan yang terjadi pada tahun 1479 ini tentunya memiliki makna simbolis dimana Syarif Hidayatullah memiliki legitimasi yang cukup kuat sebagai calon pengganti sebagaimana yang pernah terjadi

beberapa pemimpin sebelumnya seperti Ki Danusela yang menjadi menantu Ki Gedheng Kasmaya sebelum diangkat sebagai Ki Kuwu Cirebon pertama dan Pangeran Cakrabuwana yang menjadi menantu Ki Danusela (Ki Gedheng Alang-alang) sebelum menggantikan mertuanya sebagai Ki Kuwu Cirebon kedua (Tjandrasasmita, 2009).

Kedua, setelah menikah dengan Nyi Mas Pakungwati, Syarif Hidayatullah diberi gelar Tumenggung Caruban. Hanya berbeda dengan proses penganugerahan Katumenggungan yang terjadi pada Pangeran Cakrabuwana, anugerah Tumenggung Caruban ini langsung dilakukan oleh Pangeran Siliwangi. Meskipun demikian, penganugerahan gelar ini menjadi bukti akan legitimasi Syarif Hidayatullah menjadi pengganti Pangeran Cakrabuwana sebagai Kuwu Cirebon ketiga. Hal lain yang juga bisa disimpulkan dari peristiwa penobatan ini adalah bahwa Cirebon saat itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Hindu Pajajaran dan sampai di situ pula Pangeran Cakrabuwana lebih cenderung untuk mengangkat Syarif Hidayatullah sebagai Kuwu Cirebon dan bukan Raja sebagaimana yang justru akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang.

Lepas dari polemik kekuasaan di atas, peristiwa perkawinan dengan Nyi Mas Pakungwati dan penganugerahan gelar Tumenggung ini sebenarnya secara *de facto* menjadikan Syarif Hidayatullah sebagai pengganti yang "sah" dari Pangeran Cakrabuwana, meskipun belum melalui upacara penobatan secara resmi. Tidak ada penjelasan secara pasti alasan penundaan penobatan ini. Hanya sumber sejarah lokal menjelaskan bahwa justru Syarif Hidayatullah sendiri yang menolak untuk penobatan secara cepat ini karena ia bermaksud untuk mencari pengalaman yang lebih luas dulu sebelum benar-benar menjadi pengganti Pangeran Cakrabuwana.

Penobatan Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin baru Cirebon untuk menggantikan Pangeran Cakrabuwana akhirnya baru terjadi pada tahun 1482. Dengan penobatan itu telah resmiah Syarif Hidayatullah menjadi penguasa baru Cirebon. Ternyata, penobatan politik ini juga diikuti oleh penobatan secara religius yang dilakukan oleh Dewan Walisongo yang dipimpin oleh Sunan Ampel sekaligus representasi Kerajaan Islam Demak dengan gelar *Sunan Carbon Sinarat Sundha*. Kedua peristiwa penobatan ini, Syarif

Hiadatullah secara langsung tidak saja diangkat sebagai pemimpin politik tetapi juga agama. Tidak heran jika gelar yang diterima juga merepresentasikan kedua fungsi dan wewenang ini sebagaimana terlihat dari rangkain kata dalam gelarnya, "*Inkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purwabawisesa Panetep Penatagama Aulia Allahu Ta'ala Kutubil Jaman, Kholifatu Rosulillahi Sholallahu Alaihi Wasalam*" atau yang secara singkat disebut dan dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati (Rosidin, 2017).

Dalam konteks politik paska penobatan ini, Cirebon secara politik berada di bawah dua kerajaan sekaligus yaitu Kerajaan Hindu Pajajaran yang merupakan warisan pendahulunya dan Kerajaan Islam Demak dimana seluruh para wali di pulau Jawa tergabung secara politik dan baru merdeka dari Kerajaan Hindu Majapahit beberapa tahun sebelumnya. Dalam posisi tersebut ternyata Syarif memilih untuk berada di bawah Kerajaan Islam Demak dan memerdekakan diri dari Kerajaan Hindu Pajajaran sekitar tiga tahun setelah dinobatkan sebagai penguasa Cirebon. Tidak ada penjelasan yang pasti tentang alasan utama dibalik keputusan tersebut. Namun, statusnya sebagai pemimpin agama sekaligus anggota dewan Walisongo yang bertugas menyebarkan Islam di wilayah bagian barat pulau Jawa serta semangat dan keberhasilan untuk melepaskan dari kekuasaan non-Muslim sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Islam Demak pada tahun 1478 nampaknya menjadi acuan utama bagi Sunan Gunung Jati untuk membuat keputusan tersebut (Tjandrasasmita, 2009).

Salah satu wujud utama dari implementasi keputusan "merdeka" tersebut adalah penolakan Cirebon untuk mengirimkan upeti dalam bentuk garam dan terasi ke Pajajaran. Keputusan "merdeka" secara sepihak yang diikuti oleh penolakan pengiriman upeti tersebut untuk melepaskan diri kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran tentunya mendapat reaksi negatif dari penguasa Pajajaran. Tumenggung Jayabaya yang dulu pernah diutus untuk menganugerahkan gelar Tumenggung Sri Mangana kepada Pangeran Cakrabuwana diperintahkan untuk menumpas kekuatan Sunan Gunung Jati. Namun upaya ini gagal ketika justru Tumenggung Jagabayan beserta pasukannya masuk Islam. Kegagalan ini mendorong Pajajaran untuk mengerahkan pasukan yang lebih besar.

Namun hal ini batal dilakukakan karena Sunan Gunung Jati dpandang oleh para penasehat Kerajaan Pajajaran bukanlah orang lain melainkan cucunya Prabhu Siliwangi serta semakin kuatnya kekuatan Sunan Gunung Jati seiring datangnya bantuan dari Kerajaan Islam Demak. Kegagalan untuk menaklukan kembali Cirebon sekaligus menandai lahirnya Kerajaan Islam Cirebon dibawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati.

Di bawah kepemimpinan yang baru ini, Cirebon tidak saja berhasil menjadi negara merdeka dari kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran, akan tetapi terus melakukan perluasan wilayah yang dahulunya dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Setahap demi setahap, berbagai wilayah di bagian barat pulau Jawa jatuh di bawah pengaruh Kerajaan Islam Cirebon termasuk penaklukan Sunda Kelapa dan penguasaan wilayah Banten pada tahun 1520-an. Penaklukan yang secara terus menerus dilakukan oleh Kerajaan Islam Cirebon berakibat buruk bagi Kerajaan Pajajaran, hingga akhirnya benar-benar jatuh pada tahun 1579 atau 11 tahun paska meninggalnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568 (Rosidin, 2019).

Di Cirebon, meninggalnya Sunan Gunung Jati kepemimpinan diambil oleh menantu Sunan Gunung Jati, Fatahillah, selama dua tahun sebelum digantikan oleh cicit Sunan Gunung Jati sekaligus cucu Pangeran Pasarean melalui Pangeran Swarga, yang bernama Pangeran Mas Zaenul Arifin yang bergelar Panembahan Ratu I. Selama masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan oleh Panembahan Ratu kecuali hanya meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh buyutnya, Sunan Gunung Jati. Dalam konteks perluasan wilayah mungkin peristiwa peggancuran sisa-sisa Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 saja pasukan Cirebon aktif dalam peperangan perluasan wilayah. Itupun statusnya hanyalah membantu pasukan Banten yang dipimpin oleh pamannya Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanudin. Selebihnya, sejarah banyak mencatat bahwa Panembahan Ratu lebih menyibukkan diri untuk kehidupan spiritualnya dibandingkan dengan perluasan wilayah.

Meski secara politik Cirebon telah merosot tajam dan bahkan belum pernah bangkit kembali meskipun telah lepas dari belenggu penjajahan Belanda dan juga Jepang serta telah berada di bawah sistem pemerintah Republik Indonesia yang

merdeka, Cirebon tetap baik secara historis maupun budaya dipandang sebagai pusat syiar Islam sejak awal kemunculannya.

Sejarah Cirebon sebagaimana telah dijelaskan di atas identik dengan sejarah Islamisasi wilayah bagian barat pulau Jawa. Para pendiri dan pelopor Cirebon adalah para muballigh Muslim seperti Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati hingga para penguasa seterusnya. Tidak heran jika nilai, prinsip dan tradisi yang berkembang dan dikembangkan di Cirebon baik melalui istana maupun masyarakatnya sangat erat dengan Islam. Cirebon dalam konteks nusantara mungkin sejajar dengan Aceh dalam kaitannya dengan posisi Islam dalam struktur nilai dan tradisi masyarakatnya.

Proses Islamisasi semakin intensif ketika kepemimpinan berada di tangan Sunan Gunung Jati. Proses Islamisasi ini sebagaimana telah dibahas di atas juga meliputi aspek politik pemerintahan dimana Sunan Gunung Jati mengambil keputusan untuk membawa Cirebon melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya. Keputusan ini seolah menegaskan bahwa Cirebon telah berubah menjadi *Daulah Islamiyah* (wilayah Islam) yang akan menerapkan prinsip-prinsip serta hukum Islam seutuhnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pada saat yang sama, Cirebon bergabung dengan kekuatan politik Islam lainnya yaitu Kerajaan Islam Demak. Cirebon bergabung dengan Demak untuk membentuk poros politik yang tangguh di pulau Jawa sebagai basis penting dalam menyebarkan dan membangun peradaban Islam. Kombinasi kekuatan politik ini telah berhasil meruntuhkan kekuatan politik Hindu yang telah sekian abad lamanya menancapkan pengaruhnya di pulau Jawa melalui beberapa kerajaan besarnya seperti Kerajaan Majapahit di bagian tengah dan timur pulau Jawa dan Kerajaan Pajajaran di bagian barat. Dengan kombinasi kekuatan politik Islam ini pula, Islam pada akhirnya menjadi kekuatan agama mayoritas di pulau Jawa dan Islam sebagai sebuah doktrin dan sistem idea dan nilai akhirnya menjadi *binding* atau *driving force* bagi penduduk pribumi ketika melawan penjajahan asing di masa-masa yang akan datang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa agama Islam masuk ke Cirebon pada permulaan abad ke-14 M. Kondisi itu bersamaan terjadinya kontak pertama antara orang-orang asing, dalam hal ini orang Arab dan Tiongkok dengan pribumi. Islam pun dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai agama pendatang yang dibawa oleh para pedagang Arab dan Tiongkok. Namun, karena saat itu belum terjadi kontak budaya yang signifikan, penyebaran Islam pun terjadi secara masif pada masa Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon yang pada masa itu telah menjelma menjadi sebuah kerajaan Islam.

Di samping itu, keberadaan Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, menjadikan Islam di Cirebon mengalami kejayaan dalam perkembangannya. Kesultanan Cirebon memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Kepemimpinan raja-raja yang beragama Islam, strategi dakwah yang damai dan akomodatif, serta posisinya sebagai pusat penyebaran Islam menjadikan Cirebon sebagai salah satu kesultanan Islam yang paling berpengaruh di Nusantara.

Perkembangan Islam di Cirebon tersebut tidak lepas lekatnya hubungan antara Islam di satu sisi dengan keraton di sisi lainnya. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa meski Islam pada awalnya tidak dikenalkan oleh para penguasa lokal, Islam di Cirebon di masa selanjutnya identik dengan keraton. Sosok Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati tidak saja merepresentasikan sebagai penguasa secara politik, tetapi juga sebagai sosok penyebar Islam (*muballigh*). Bahkan, Sunan Gunung Jati secara khusus tercatat sebagai salah satu dari Sembilan Wali (Walisongo) paling dihormati umat Islam di pulau Jawa. Di bawah kepemimpinannya yang menggabungkan antara misi dakwah dan politik, Islam menyebar di pulau Jawa bagian barat mulai Cirebon hingga Banten. Pada saat yang sama, ia juga berhasil mendirikan dua kerajaan Islam sekaligus di wilayah ini, yaitu Cirebon (1485) dan Banten (1527) yang akan mendominasi percaturan politik di masa-masa berikutnya. Singkatnya, Islam telah menjadi sumber nilai sekaligus identitas bagi penduduk di kedua wilayah ini hingga kini. Inilah yang kemudian menjadi catatan historiografi perkembangan Islam Nusantara di Cirebon dalam perspektif keraton.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Historiografi Perkembangan Islam Nusantara di Cirebon: dalam Perspektif Keraton.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Aminudin. 2015. Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon). *The International Jurnal of Pegon: Islam Nusantara Civilizarion*, Vol. 11 – Issue 3 Desember 2023, hlm. 49-75.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanto, Alfian. 2015. Historiografi Islam Cirebon. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 1 tahun 2015, hlm. 31-58.
- Hasmy, A. 1993. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Al-Ma'arif.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahrus El-Mawa. *Rekonstruksi Kejayaan Islam Di Cirebon Studi Historis Pada Masa Syarif Hidayatullah (1479-1568)* dalam Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin 1-4 November 2010.
- Rosidin, Didin Nurul. 2017. Ulama Pasca Sunan Gunung Jati: Jaringan Intelektual Islam Cirebon Abad ke-16 sampai dengan Abad ke-18. *Jurnal JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* – Vol 1, No 2 (2017), hlm. 177-194
- Rosidin, Didin Nurul. 2019. *Jaringan Ulama Cirebon: Keraton, Pesantren, dan Tarekat*. Cirebon: LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Sahlan, M. 2015. *Evaluasi Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjandrasasmita, Uka. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Zalfa, Siti. 2014. *Islamisasi di Cirebon (Studi tentang Peran dan Pengaruh Walangsungsang, 1445-1500 M)*. Cirebon: Skripsi Pada IAIN Syekh Nurjati